

TUGAS MAKALAH AGAMA

Demokrasi, Pendidikan, Gerakan Sosial dan Zionisme Israel dalam Pandangan Islam



NAMA :Moh.Ervan Nandiasha

NIM :13040110060041

Prodi :D-3 Perpustakaan &Informasi (Kls 9)

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Diponegoro Semarang

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang masalah

Islam dewasa ini,tampaknya pendidikan dalam pandangan islam merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama didalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik,serta juga dengan pengelola pendidikan.sedangkan demokrasi pada pandangan islam prinsipnyadianggap sebagai pilar untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin,umur,warna kulit,agama dan bangsa.Dalam konteks ini,pengertian semokrasi tidaklah dibatasi oleh kepentingan-kepentingan individu lain.

Dan gerakan sosial islam itu sendiri di permulaan awal abad 21 tidak hanya ikut mewarnai kontestansi tapi telah memasuki jalur politik.Pada konteks ini,kemunculan gerakan social tidak semata-mata mencerminkan harapan revitalisasi eksistensi suara Tuhan namun juga menyiratkan adanya “beban” sosiologis di pundak organisasi-organisasi keagamaan yang telah lama hadir,terutama Muhammadiyah dan NU.Bagi kaum muslim memang hanya ada satu islam yang diwahyukan dan dimandatkan Tuhan,tetapi terdapat bayak penafsiran tentang islam sehingga menumbuhkan beragam kepercayaan,praktik-praktik dan masalah-masalah.

Salah satunya gerakan yang berasal dari sebuah Negara yang luasnya hanya sebesar Negara bagian di amerika serikat (New Jersey) dan hanya sejumlah penduduk Chicago,yaitu Israel.Gerakan soial Israel atau yang disebut Zionis ini memang memiliki daya tarik yang kuat dan kemampuan yang luar biasa untuk selalu menjadi topic pembicaraan dunia.Terutama dengan cerita-cerita mempesona mereka yang bahkan mereka puja melebihi Tuhan mereka itu sendiri.Dan mereka sendiri telah menjadi kaum atau gerakan yang mulai menagancam nilai-nilai tradisional dalam islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Demokrasi dalam pandangan Islam.

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), dst.

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), dst.

Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif. Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantasi prinsip amanah dan tanggung jawab (credible and accountable) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah.

Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan amar ma’ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah. Diantara dalil al-Qur’an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada’ dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim (Tolchah, 199:26).

Hakikat demokrasi yang sebenarnya adalah proses penetapan hukum di tengah-tengah manusia berdasarkan kehendak rakyat secara mayoritas. Ide demokrasi yang dikembangkan oleh Voltaire dan Montesquie dalam konteks kenegaraan ini sebenarnya telah menetapkan manusia sebagai pembuat hukum (*Musyarrif*), bukan *Al Khaliq*. Dalam format negara demokrasi, akan dianggap tidak demokratis kalau hukum yang ditetapkan berdasarkan hukum Tuhan. Oleh karena itu, ide demokrasi ini sebenarnya adalah proses pemisahan agama dari negara (*fashluddin 'an dawlah*). Falsafah Barat, *the grand process of modernization*, berpijak pada pemisahan masyarakat politik dari agama dan dari struktur agama (*uneklesastikal structure*).

Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dus dengan demikian maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil.

Watak ajaran Islam sebagaimana banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan kongkret di masyarakat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana realitas demokrasi di dunia Islam dalam sejarahnya?

Dalam realitas sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktek-praktek yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani 'Abbasiyyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis. Karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan khulafaurrasyidin (lihat Mahasin, 1999:31).

Memang harus diakui, karena kepentingan dan untuk melanggengkan status quo raja-raja Islam, demokrasi sering dijadikan tumbal. Seperti pengamatan Mahasin (1999:31), bahwa di beberapa bagian negara Arab misalnya, Islam seolah-olah mengesankan pemerintahan raja-raja yang korup dan otoriter. Tetapi realitas seperti itu ternyata juga dialami oleh pemeluk agama lain. Gereja Katolik misalnya, bersikap acuh-tak acuh ketika terjadi revolusi Perancis. Karena sikap tersebut kemudian Katolik disebut sebagai tidak demokratis. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh agama Kristen Protestan, di mana pada awal munculnya, dengan reformasi Martin Luther Kristen memihak elit ekonomi, sehingga merugikan posisi kaum tani dan buruh. Tak mengherankan kalau Kristen pun disebut tidak demokratis.

Melihat kenyataan sejarah yang dialami oleh elit agama-agama di atas, maka tesis Huntington dan Fukuyama yang mengatakan, "bahwa realitas empirik masyarakat Islam tidak kompatibel dengan demokrasi" adalah tidak benar. Inilah memang, betapa sulitnya menegakkan demokrasi, yang di dalamnya menyangkut soal: persamaan hak, pemberian kebebasan bersuara, penegakan musyawarah, keadilan, amanah dan tanggung jawab. Sulitnya menegakkan praktik demokratisasi dalam suatu negara oleh penguasa di atas, seiring dengan kompleksitas problem dan tantangan yang dihadapinya, dan lebih dari itu adalah menyangkut komitmen dan moralitas sang penguasa itu sendiri.

Dengan demikian, memperhatikan relasi antara agama dan demokrasi dalam sebuah komunitas sosial menyangkut banyak variabel, termasuk variabel independen non-agama. dalam situasi inseperti itu, penggunaan otoritas tidak bias lagi efektif mengingat tingkat warga Negara tidak cukup memadai bagi tegaknya otoritas. Bahkan, tidak jarang terjadi pembangkangan warga

Negara. yang terjadi kemudian, sejumlah wilayah atau kelompok yang merasa tidak perlu taat kepada pemerintah pusat, memisahkan diri dan membentuk Negara-negara sendiri.

Kalau aksi pembangkangan kolektif itu tidak memperoleh perhatian serius dari pemerintah, termasuk bagaimana meminimalisikannya, bukannya tidak mungkin disintegrasi politik di negeri ini akan semakin parah. Bahkan, adanya disintegrasi wilayah, dalam bentuk lahirnya Negara baru dari Indonesia bias dimungkinkan. Dan semoga ini tidak akan terjadi.

B.Pendidikan dan Gerakan Sosial dalam Pandangan Islam

Pendidikan dapat melahirkan manusia yang cerdas dan berpengetahuan yang memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan gerakan-gerakan sosial, yang dapat mendorong perubahan masyarakat. Transformasi sosial selalu bermula dari lapisan masyarakat terpelajar yang memiliki kesadaran kritis terhadap kondisi sosial politik di dalam masyarakat. Pengalaman sejarah semua bangsa menunjukkan perubahan sosial acap kali dipelopori oleh kalangan elite terdidik. Kaum intelektual dan lapisan terpelajar selalu menjadi motor penggerak perubahan sosial. Dalam perspektif sosiologis, pendidikan akan melahirkan lapisan sosial baru yang dalam struktur piramida sosial berada pada posisi kelas menengah. Lapisan kelas menengah itu mengantarai lapisan elite dan lapisan akar rumput sehingga dapat menjembatani dua kepentingan kelompok sekaligus. Dengan demikian, lapisan kelas menengah itu merupakan bagian dari kelompok strategis, yang akan memainkan peranan sentral dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

Pendidikan bertujuan membangun totalitas kemampuan manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan tiga aspek dalam diri setiap manusia: (1) *cognitive learning*, yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, potensi, dan daya intelektualitas; (2) *affective development*, yang meliputi penanaman nilai-nilai moralitas dan religiositas, pemupukan sikap emosionalitas dan sensibilitas; dan (3) *practical competence*, yang mencakup pengembangan kemampuan adaptasi sosial, pemupukan daya sensitivitas terhadap persoalan sosial kemasyarakatan, pembinaan kapasitas diri untuk memperluas berbagai pilihan dalam pekerjaan, kesehatan, kehidupan keluarga, dan masalah-masalah praktis yang lain. Pendidikan sejatinya adalah membangun manusia dalam spektrum holistik yang melingkupi keseluruhan potensi yang dimilikinya. Melalui proses pendidikan seluruh dimensi kemanusiaan dapat tumbuh-kembang secara optimal.

Pendidikan juga merupakan wahana untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial setiap orang dalam keseimbangan yang sempurna. Secara individual, pendidikan akan meningkatkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan teknis sehingga seseorang memiliki kompetensi untuk memperkuat daya sintas (*survival*)-nya dalam kehidupan. Secara sosial, pendidikan akan memberi bekal kepada seseorang dalam hal keterampilan sosial berupa kemampuan bersosialisasi, beradaptasi, berinteraksi dalam masyarakat, menjalin relasi sosial, memupuk sikap toleransi dalam dinamika kehidupan masyarakat, dan menanamkan sikap penghargaan atas realitas kemajemukan sosial, memupuk jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan komitmen pada demokrasi dan pembangunan masyarakat madani. Dalam kata-kata Jan Szczepanski, sosiolog dan ahli pendidikan Polandia, pendidikan dimaksudkan sebagai *preparation for participation in social and cultural life, the development of the cultural values to keep up the cultural identity of the nation*.

Dalam konteks demikian, memahami pendidikan sebagai strategi kebudayaan antara lain harus memberikan penekanan pada dimensi pendidikan kewargaan (*civic education*). Sebagai bangsa yang majemuk, dimensi pendidikan kewargaan harus dipupuk dan diperkuat untuk dapat mengembangkan orientasi dan wawasan mengenai realitas kehidupan kebangsaan yang

pluralistik. Dalam pendidikan kewargaan kita ingin membangun kesadaran setiap warga masyarakat tentang kenyataan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. Bangsa ini dibangun di atas landasan keberagaman agama, etnik, ras, budaya, dan adat-istiadat, yang menuntut kesediaan untuk saling menerima keberadaan tiap pihak. Bangunan negara-bangsa ini bercorak multikultural sehingga setiap elemen sosial harus bersedia hidup secara koeksistensial. Multikulturalisme mengandaikan adanya keinsafan bahwa dalam sebuah masyarakat yang majemuk harus tersedia ruang publik yang cukup untuk bisa saling berinteraksi di antara segenap komponen bangsa, dengan semangat saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Multikulturalisme mengandaikan pula adanya pengakuan atas keberadaan kekuatan lokal (kedaerahan), keberagaman kebudayaan tradisional, serta kelompok dan golongan sosial yang bervariasi, tanpa disertai sikap egosentrisme sektoral. Di dalam masyarakat multikultural tidak ada kelompok etnik tertentu yang dapat mendominasi dan menyubordinasi kelompok etnik lain. Juga tidak ada yang disebut hegemoni budaya yang menciptakan polarisasi pusat dan pinggiran. Karena itu, pendidikan kewargaan menjadi sangat penting terutama untuk menumbuhkan sikap toleransi dan memperkuat basis solidaritas sosial. Penekanan pada pendidikan kewargaan ini amat penting untuk dapat mereduksi atau mengeliminasi potensi konflik dalam masyarakat majemuk. Dengan demikian, upaya membangun harmoni sosial dapat terlaksana sehingga kohesi di dalam masyarakat akan tercipta. Sebagai suatu bentuk strategi kebudayaan, pendidikan juga dimaksudkan untuk menyiapkan individu dan masyarakat agar dapat membangun kehidupan modern. Pendidikan merupakan pangkalan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian; wahana sosialisasi nilai, pembinaan sikap mental dan karakter; pemupukan jiwa kreatif yang dapat mendorong tumbuhnya iklim kebebasan dan daya cipta sehingga terbuka kemungkinan dilakukannya berbagai eksperimentasi. Melalui jalan eksperimentasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang maju dengan tetap berpijak pada basis budaya masyarakat sebab perkembangan dan kemajuan iptek tak mungkin dapat dilepaskan dari tradisi dan kebudayaan masyarakat bersangkutan. Agar iptek memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat, iptek harus mempunyai basis sosial budaya yang kuat. Jadi ada keterkaitan erat antara ilmu pengetahuan dan kebudayaan, seperti ditulis Talcott Parsons, *science is ultimately integrated with the social structure and cultural traditions of a society; they mutually support one another.*

Salah satu ukuran keberhasilan pendidikan adalah ketika mampu melahirkan individu-individu yang berjiwa otonom dan bebas. Otonomi dan kebebasan merupakan basis bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran progresif dan visioner, yang memiliki jiwa kreatif sehingga dapat mengembangkan daya imajinasi secara maksimal. Sebaliknya, pendidikan dinilai gagal bilamana hanya melahirkan, meminjam istilah Erich Fromm, *automaton--mahluk hidup yang bergerak dan berpikir menyerupai mesin.* Manusia *automaton* sejatinya kehilangan hakikat diri karena tak punya otonomi dan kebebasan sehingga tak mampu mengembangkan jiwa kreatif. Daya imajinasi menjadi tumpul, sulit melahirkan pemikiran-pemikiran progresif dan visioner yang mencerahkan. Padahal, dengan jiwa kreatif dan daya inovasi manusia akan mampu bangkit untuk mencapai kemajuan. Individu yang berjiwa kreatif dan inovatif selalu memandang realitas kehidupan dengan perspektif optimistik, yang disertai daya kritisisme untuk selalu mempersoalkan dan menggugat tradisi dan kebudayaan yang ada. Kebudayaan bukan sesuatu yang statis, tetapi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat. Kebudayaan berkembang secara dialektis mengikuti dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam konteks kebudayaan, pendidikan merupakan wahana bagi proses pencerdasan masyarakat, yang dilakukan secara sistematis dan programatis untuk memperkuat akar-akar tradisi dan kebudayaan bangsa, dengan tetap membuka diri bagi proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Karena itu, dalam proses pendidikan niscaya akan berlangsung suatu interaksi dialektis di antara beragam pemikiran dan nilai-nilai, yang menghasilkan inovasi dan akulturasi. Pendidikan sebagai strategi kebudayaan akan terasa lebih bermakna ketika mampu memberi kontribusi dalam proses penguatan institusi-institusi sosial dan budaya. Juga dapat melahirkan *critical mass* yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat yang kemudian dapat meningkatkan kapasitas bangsa, *the improving capacity of a nation*.

MARX sought to change the world through changing social institutions, Jesus through changing the hearts of men. Education tries to do both. (Howard R Bowen, *Investment in Learning*, 1997)

Kutipan tersebut menegaskan pendidikan merupakan instrumen penting dan strategis untuk mendorong perubahan sosial di masyarakat. Namun, pendidikan menempuh jalan tengah antara aliran marxisme yang radikal-revolusioner dan aliran humanisme yang menempuh cara evolusi dalam menggerakkan perubahan. Pendidikan mengombinasikan antara progresivitas kaum Marxian dan pendekatan gradual milik kaum humanis.

C. Gerakan Zionis Israel dalam Pandangan Islam

Pemahaman utama dalam zionis adalah bahwa alternatif satu-satunya untuk permasalahan yahudi adalah kembalinya yahudi ke tanah Israel (Palestin) dengan mendirikan nrgara Yahudi. Untuk menempuh hal itu, perlu dilaksanakan hijrah besar-besaran dari berbagai pelosok dunia ke tanah Israel.

Pendiri Zionis adalah Teodor Hertizel pada tanggal 19 Desember 1894 di kota yang tidak ada pengaruh Bibel, yaitu Paris. Ada perbedaan pendapat dua kubu yang sangat besar dalam pergolakan Zionis ini. Kubu pertama merupakan pengagum Hertizel lebih memprioritaskan pendirian Negara Israel raya di tanah Palestin. Sementara golongan kedua lebih berkonsentrasi pada pembentukan masyarakat Yahudi dengan konsentrasi hijrahnya kaum Yahudi ke tanah itu dan kemudian dengan sendirinya akan membentuk Negara Yahudi yang kuat. Jadi untuk mendirikan Negara Israel, tidak perlu mencaplok kekuatan Palestin.

Dalam pemikiran Zionis ada beragam kelompok, di antaranya adalah:

1. Sintetic Zionism

Golongan ini adalah pemahaman “taufiqi-yyah” yaitu berangkat dari pertentangan zionis antara pemikiran politik dan praktek social. Pertentangan ini distimulasi pandangan dan usaha Hertizel yang menyatakan bahwa masalah Yahudi/Israel bukan masalah social atau agama, tapi murni masalah politik. Gelombang pemikiran “Taufiqiyah” ini merupakan penggabungan dari pertentangan pendapat tadi, yang lebih menekankan segala isyu untuk kemaslahatan bersama

2. Revisionist Zionism

Pemahaman ini dipelopori oleh Vladimir Gabotenski. Golongan ini adalah pengagum berat pandangan Weizman yang pandangannya tidak terakomodasi oleh pemahaman zionis yang lain, timbulnya pemahaman ini sebagai akibat ketidakpuasan pengagum Weizman yang berbeda dengan Ben Gonon dalam masalah kedekatan hubungan timbal-balik Israel-Inggris. Penganut Revisionis ini adalah kaum Fundamentalis kanan.

3. Cultural Zionism

Pemahaman ini adalah pandangan zionisme modern. Cenderung tidak sependapat dengan Hertizel. Mereka lebih memahami bahwa masalah politik atau pun ekonomi, tapi hanyalah masalah kurangnya kesatuan antar kaum Yahudi itu sendiri. Dan sama seperti yang lainnya, solusi untuk mengarahkan ke arah ini adalah dengan mendirikan Negara Israel sebagai kekuatan politik kaum yahudi.

4. Tentorig Zionism

Pelopop pemahaman ini adalah Zanjuel, orang Yahudi asal Inggris. Pemahaman ini berbeda dengan isme-isme zionis lainnya, paham territorial Zionism ini lebih menekankan bahwa yang sebenarnya layak untuk dijadikan Negara Israel adalah di daerah Afrika Timur yaitu daerah Uganda. Mereka berfikir logis, karena sampai kapanpun, bila mendirikan Negara di palestina tidak akan pernah damai dengan Negara Arab.

Negara Israel itu sendiri berasal dari rentetan sejarah yang diambil dari zaman Nabi Ya'qub. Israel merupakan gabungan dan akar kata "isr" dan "Eil". Isr berarti hamba dan Eil bermakna Tuhan (Allah) maka Esrael berarti hamba Tuhan. Adalah David Ben Gonon pada tanggal 15 Mei 1948 memproklamkan kepada masyarakat dunia bahwa Negara Israel telah berdiri. Dan pada saat itu pula perang sengketa Arab-Israel dimulai. Proklamasi Negara yahudi ini merupakan rentetan panjang dan usaha kaum Yahudi dengan Zionismenya. Salah satu di antaranya adalah bahwa proklamasi ini merupakan realisasi dari konferensi Zionis I di Swiss pada tanggal 29 Agustus 1898. Isi dari Mukhtamar I adalah pendesakan mendirikan Negara Palestina serta mengusahakannya masuk dalam ketentuan positif internasional. Jumlah warga Negara Yahudi ketika memproklamkan Negara Israel itu sebanyak 649.932 orang.

Ada perbedaan pandang antar dunia Barat dengan Timur, khususnya Palestin tentang pendirian Negara Israel ini. Orang barat lebih memandang bahwa Israel perpanjangan Modern dan sebuah kisah 300 tahun, tentang hubungan Yahudi dengan Palestin. Bangsa palestina dipaksa oleh barat agar mampu mengerti apa yang mereka pahami dari kaca mata mereka. Sebaliknya, orang Palestin memandang bahwa pendirian Negara Israel di Palestin merupakan kesalahan politik Barat yang lahir dari rasa bersalah barat. Dan seperti halnya orang Yahudi tidak menghargai keberadaan bangsa Palestin di tanah yang didudukinya. Orang Palestina pun tidak menghendaki hidupnya bangsa Yahudi di daerah yang mereka duduki.

Maka, perseteruan antar dua Negara itu tidak akan pernah berakhir. Wajar kalau oleh dunia media dibahasakan dengan kalimat menarik atau unik, karena selalu terjadi berita yang hangat. Secara objektif juga kita katakan bahwa Negara Israel merupakan penjelmaan agama Yahudi. Maka tidak ayal lagi jika kita lihat fenomena kenegaraan di Israel pun banyak berbenturan sengan persoalan agama dan Negara. Dan sudah menjadi kepastian akan beradu dua opini sekuler dan fundamentalis.

BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

B.DAFTAR PUSTAKA

- >Maschan Moesa,Ali.2002.NU,*Agama dan Demokrasi*.Pustaka Dai Muda:Surabaya
- >Setiyaji,Achmad;Usep Romli;Zainurrofiq.2003.*ZIONIS ISRAEL:Di balik Invasi AS ke Irak Upaya Menciptakan Israel Raya*.Mujahid Press:Bandung
- >Achmad,Ubaidillah dkk.2006.*Jurnal Edukasi:Islam Kiri:Pendidikan dan Gerakan Sosial*.IAIN Walisongo Press:Semarang
- >www.wordpress.com/ILMU PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM « BANK MAKALAH, OPINI, ARTIKEL.html (di kutip tanggal 08-10-2010)
- >www.mubarokinstitute.blogspot.com//pandangan-islam-tentang-pendidikan.html (di kutip tanggal 08-10-2010)
- >www.google.co.id
- >www.wikipedia.com